



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TIM PENYUSUN DAN TIM REVIEW
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/3272/Otda tanggal 18 April 2023 perihal Undangan Pemberian Penghargaan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meraih Peringkat ke II Tingkat Nasional dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
 - c. bahwa keberhasilan meraih prestasi dalam penyampaian laporan didukung oleh tim penyusun laporan, maka dalam rangka memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tim Penyusun dan Tim Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat dan Badan yang telah Berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 31);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TIM PENYUSUN DAN TIM REVIEW APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KESATU ...

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Tim Penyusun dan Tim Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

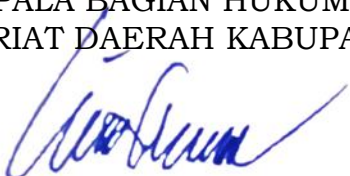
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
TIM PENYUSUN DAN TIM REVIEW
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAHAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

I. TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN LPPD
1.	Drs. AGUS KORI HIDAYAT, M.Si Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	NASAM , SE.,Ak Inspetur Daerah Kabupaten Sumedang	Wakil Ketua
3.	Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris
4.	ATANG MAHPUDIN, S.AP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Wakil Sekretaris
5.	FANDY ABDULLAH, S.STP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
6.	N. DEWI RATNA NOVIANTI, S.IP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
7.	WIWIN HERYATI, S.AP Analisis Pemerintahan Daerah Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
8.	NURYANA SETIADININGRAT, S.STP Analisis Pemerintahan Umum dan Otda Muda pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
9.	PIPIN Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
10.	MIRSANA ISHENDARU, MP.,VA.KS., M.Si Perencana Ahli Muda pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang	Anggota
11.	RADEN ELA HERAWATI, S.AP Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang	Anggota
12.	M.ZAENAL ARIPIIN, S.Hut Plt.Kasubag Keuangan/Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/Koodinator Program pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

NO	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN LPPD
13.	ANANG SURYANA, S.Hut Operator LPPD pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14.	DENY FELANY, SE.,M.Si Penyusun Program dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
15.	KUSUMADEWI SEPTIANI, S.E. Operator LPPD pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
16.	ZENI ADLAN, S.Sos Kasubag Program pada Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
17.	WELI WAROJA Pengelola LPPD pada Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
18.	LALA HERMILA, S.Pd Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Anggota
19.	SULIGAR ROCHIMAT Pengelola LPPD pada Dinas Sosial	Anggota
20.	TAJUDIN BURHAN, S.Pt.,MM Perencana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
21.	RIKY RUDIAT, S.Tr.P Stap Perencana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
22.	EVI ISNAENY, S.T. Analisis Perencana pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
23.	RINDU KUSUMA NINGRUM Pengelola LPPD pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
24.	ELIS KARYATI, S.E., M.Si Kasubag Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
25.	HERU SAWALUDIN, S.T Stap Pengelola LPPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
26.	AHMAD HANFIAH , S.IP., M.M Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Pendidikan	Anggota
27.	KURNIA HIDAYAT, S.Kom Pengelola LPPD pada Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan	Anggota
28.	ACEP IMAN SUPER, S.Kep.Ners., M.Kep Perencana Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan	Anggota
29.	RAHMAWATI NUR UTAMI, S.E Pengelola LPPD pada Dinas Kesehatan	Anggota
30.	GUMILAR Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN LPPD
31.	MALIYANA ENKGON, S.Sos Pengelola LPPD pada Dinas Perikanan dan Peternakan	Anggota
32.	ASEP DJUNAEDI, S.I.P Kasubag Program pada Dinas Perhubungan	Anggota
33.	JEJET RUHJAT, A.Md Pengelola LPPD pada Kasubag Program Dinas Perhubungan	Anggota
34.	WIWIT FITRIANI, S.T Perencana Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
35.	NOPI SUNTARI Pengelola LPPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
36.	IKA HERMAWATI, S.T Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
37.	IDA ROSIDA Pengelola LPPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
38.	Drs ANA YULIANA Kasubag Program pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
39.	IWAN SATRIANA Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
40.	ROMI SUGRIANTO, S.Hut., M.M Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
41.	DADAN ANDRIANA ISKANDAR, S.Pd Analisis Perencana Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
42.	ANI WIDAYANI, SIP.,M.Si Perencana Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
43.	DIAN ANDREAS Pengelola LPPD pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
44.	ELGA HIDAYAT, S.E Kasubag Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Anggota
45.	IIS GUSRINI, S.E., M.Si Pengelola LPPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Anggota
46.	APRIANTO KARTAWIJAYA Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN TIM PENYUSUN LPPD
47.	HARRI RAHMATULLAH HIJRAH Pengelola LPPD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
48.	LURRY HANDAYANI, A.Md Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
49.	ASEP WARDANA, S.Kom Operator pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
50.	GATOT HANDOKO, S.E. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota
51.	KOMAR HIDAYAT, S.E. Fungsional pada Inspektorat	Anggota
52.	R. KOSDIANI WULANDARI Kasubag Perencana dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
53.	AGUNG SUMARYONO Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
54.	CECE HERMAN CAHYONO, S.IP., M.AP Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
55.	JAJAT SUDRAJAT, S.Sos Pelaksana Pengelola LPPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
56.	YOSEP DEDE SULAEMAN, S.S., M.Si Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
57.	REGINA WIDYA UTAMI, SE., M.Si Pengelola LPPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
58.	LIA RELIAWATI, Amd Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota

II. TIM REVIEW APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA	JABATAN TIM APIP LPPD
1.	NASAM , S.E.,Ak Inspetutur Daerah Kabupaten Sumedang	Ketua

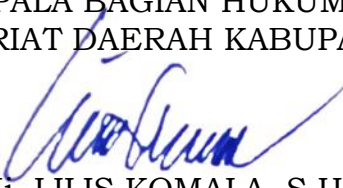
NO	NAMA	JABATAN TIM APIP LPPD
2.	SUSANTI, S.E.,M.Si Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang	Sekretaris
3.	Drs. H. ROHAENDI, M.M. (PPUPD Madya)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang
4.	Ir. YUSTISI SAIDAH, M.M. (PPUPD Madya)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang
5.	THAMRIN HARYANTO, S.E. (PPUPD Madya)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang
6.	NENTY AMDORINA, S.IP. (PPUPD Muda)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang
7.	LAELA TRESNAWATY, S.Sos., M.I.Kom. (PPUPD Muda)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang
8.	ISMAWATI, S.H.,M.T.,MMG (Auditor Muda)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang
9.	AAM SITI MUNAWAROH, S.H. (Auditor Pertama)	Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002